



RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah, sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam system perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) integrasi perencanaan pembangunan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk 5 (lima) tahun untuk perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau dengan kata lain Rencana Kerja DPMPTSP yang selanjutnya disebut Renja DPMPTSP Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, didasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing bidang dan bagian di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta melalui proses mekanisme perencanaan pembangunan daerah dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Kedua mekanisme tersebut dilakukan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan dan forum OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2023;
13. Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah

operasional dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah ;

1. Menjabarkan arahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024.
2. Mengintegrasikan antara perencanaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan perencanaan OPD dalam hal ini penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini merupakan bahan finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS, RKA OPD Tahun 2023 dan DPA OPD Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

1. Pada Bab I berisi penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

2. Pada Bab II berisi uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Bab ini terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
3. Pada Bab III berisi uraian telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.
4. Bab IV menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.
5. Bab V berisikan uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur selama Tahun 2023 dan perkiraan target Tahun 2023. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (Input), Keluaran (Output), hasil (Outcome), Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impact).

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

1) Evaluasi Program Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan pagu dana sebesar Rp. **23.659.063.006** (Dua puluh tiga miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta enam puluh tiga ribu enam rupiah) dengan program ada 11 (Sebelas) dan kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 17 (Tujuh Belas) yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasional Rp. 10.922.382.049,-
- b. Belanja Modal Rp. 12.736.680.957,-



**PENJABARAN LAPORAN REALIASI ANGGARAN, PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode				Urusan /Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2023	Tingkat Capaian (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
2.18	01	02.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.112.451.900	3.243.195.973	4.572.511.757	3.911.155.985	75,76	5.149.997.814	4.119.998.251	80	
02.18	01	02.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	4.112.451.900	3.243.195.973	4.572.511.757	3.911.155.985	75,76	5.149.997.814	4.119.998.251	80	
2.18	01	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	882.408.344	21.650.000	894.000.000	47.635.650	5	429.320.000	343.456.000	80	
02.18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	76.648.000	-	47.800.000	47.635.650	99,66	85.000.000	68.000.000	80	
02.18	01	02.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya	431.790.896	-	690.440.000	413.860.789	61,58	344.320.000	275.456.000	80	
02.18	02	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85.000.000		-			-	-		
02.18	02	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	288.969.448		155.760.000	-	-	-	-		
02.18	02	02.02	12	Belanja Kursus/Pelatihan ,Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Kursus/Pelatihan,Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	21.650.000	-	-	-	-	-		

2.18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli tiap tahun	13.900.000.000	-	6.038.351.940	5.512.532.100	91,32	4.061.230.000	3.248.984.000	80	
2.18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.700.000.000	-	3.309.894.530	2.997.499.727	29,31	410.006.000	328.004.800	80	
2.18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.956.800	175.797.022	513.849.800	286.385.521	56	488.248.000	390.598.400	80	
2.18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam 1 tahun	73120800	67.900.929	73.120.800	58.289.940	81,65	140.590.000	112.472.000	80	
2.18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 1 Unit Lapangan selama 1 tahun	99.286.000	29.131.880	110.389.000	129.530.681	57,68	40.800.000	32.640.000	80	
2.18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.840.000	17.382.125	231.280.000	17.374.700	9,43	118.000.000	94.400.000	80	
2.18	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	179.710.000	61.382.088	99.060.000	81.190.200	81,96	188.858.000	151.086.400	80	
2.18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	150.018.000	116.033.914	77,35	217.526.000	174.020.800	80	
2.18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	108.763.000	87.010.400	80	

2.18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	108.763.000	87.010.400	80	
2.18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	300.000.000	-	150.018.000	116.033.914	77,35	-	-	-	
2.18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	
2.18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	150.000.000	-	150.018.000	116.033.914	77,35	-	-	-	
2.18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	700.150.000	9.218.750.000	629.202.000	468.171.178	74,41	589.749.200	471.799.360	80	
2.18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	700.150.000	9.218.750.000	629.202.000	468.171.178	74	589.749.200	471.799.360	80	
2.18	03	02.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	-	77.554.000	2.409.800	3,11	6.249.200	4.999.360	80	
2.18	03	02.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	550.150.000	9.218.750.000	551.548.000	465.761.378	84,43	583.500.000	466.800.000	80	
2.18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	840.122.000	-	246.988.000	182.801.249	74,01	678.152.000	542.521.600	80	

2.18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan yang di terbitkan dan laporan realisasi izin	840.122.000	-	246.988.000	182.801.249	74,01	678.152.000	542.521.600	80	
2.18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Implementasi Penggunaan Sistem Informasi SiCantik dan OSS Bagi Aparatur	45.000.000	-	94.868.000	63.374.569	66,80	410.959.000	328.767.200	80	
2.18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah b8ku laporan Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	275.776.000	-	67.280.000	52.862.824	78,57	239.273.000	191.418.400	80	
2.18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Perizinan Tertentu yang terinventarisasi, Verifikasi dan Monitoring	50.000.000	-	-	-	-	27.920.000	22.336.000	80	
2.18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	469.346.000	-	84.840.000	66.563.855	78,46	-	-	-	
2.18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	770.345.448	267.270.356	443.196.000	344.355.000	77,70	406.900.000	325.520.000	80	
2.18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	770.345.448	267.270.356	443.196.000	344.355.000	77,70	406.900.000	325.520.000	80	

2.18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Proyek yang dilakukan Pemantauan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan peraturan penanaman modal	375.776.000	101.791.320	91.715.000	50.400.000	54,95	101.030.000	80.824.000	80	
2.18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pembinaan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal dan kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan peraturan penanaman modal	288.969.448	136.159.000	232.341.000	192.070.000	82,67	197.250.000	157.800.000	80	
2.18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	105.600.000	29.320.036	119.140.000	101.885.000	85,52	108.620.000	86.896.000	80	
2.18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase data dan sistem informasi penanaman modal yang terkelola	-	-	60.400.000	60.400.000	100	294.416.000	235.532.800	80	
2.18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya media informasi DPMPTSP sebagai media informasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	60.400.000	60.400.000	100	294.416.000	235.532.800	80	
2.18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	-	-	60.400.000	60.400.000	100	294.416.000	235.532.800	80	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki urusan pelaksana administrasi publik di bidang perizinan yang dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan dunia usaha.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah memberikan jasa pelayanan perizinan.

Adapun jenis-jenis pelayanan perizinan yang ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah :

No	Sektor	Jenis Izin
1.	Pendidikan	1. Izin Lembaga Pelatihan/Kursus
		2. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMP/MTs dll) yang diselenggarakan oleh Masyarakat/Yayasan/PT
		3. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta (SDS/MI) yang diselenggarakan oleh masyarakat/Yayasan/PT.
		4. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK/RA) Pendidikan Formal.
		5. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (KBA, TPA, TPQ dll) Pendidikan Non Formal.
		6. Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
		7. Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2.	Kesehatan	1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D
		2. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D.
		3. Izin Mendirikan Klinik Pratama.
		4. Izin Operasional Klinik Pratama

	5. Izin Mendirikan Klinik Utama
	6. Izin Operasional Klinik Utama
	7. Izin Mendirikan Klinik Kecantikan.
	8. Izin Operasional Klinik Kecantikan.
	9. Surat Izin Praktik Terapis Wicara.
	10. Surat Izin Praktik Bidan (Perorangan).
	11. Izin Tempat Rehabilitasi Penggunaan Narkotika.
	12. Surat Izin Praktik Bidan (di Fasilitas Kesehatan)
	13. Surat Izin Praktik Perawat (Perorangan)
	14. Surat Izin Praktik Perawat (di Fasilitas Kesehatan)
	15. Surat Izin Praktik Dokter Gigi (Perorangan)
	16. Surat Izin Praktik Dokter Gigi (di Fasilitas Kesehatan)
	17. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (Perorangan)
	18. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis (di Fasilitas Kesehatan)
	19. Surat Izin Praktik Dokter Umum (Perorangan)
	20. Surat Izin Praktik Dokter Umum (di Fasilitas Kesehatan)
	21. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (Perorangan)
	22. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (di Fasilitas Kesehatan)
	23. Surat Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat
	24. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi
	25. Surat Izin Praktik Radiografer
	26. Surat Izin Praktik Refraksiones Optisien
	27. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik
	28. Surat Izin Praktik Perawat Gigi
	29. Surat Izin Praktik Penata Anestesi
	30. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
	31. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian
	32. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
	33. Surat Izin Praktik Fisiotrafis
	34. Surat Izin Praktik Elektromedis
	35. Surat Izin Praktik Perekam Medis
	36. Surat Izin Praktik Optometris
	37. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi
	38. Surat Izin Praktik Apoteker
	39. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Transfusi Darah

		40. Izin Operasional Pemberantasan Hama Vektor
		41. Izin Praktik Tukang Gigi
		42. Surat Izin Apotek
		43. Izin Toko Obat
		44. Izin Penyelenggaraan Optik
		45. Izin Salon Kecantikan
		46. Izin Rumah Bersalin
		47. Izin Pengobatan Tradisional
		48. Izin Air Minum Dalam Kemasan
		49. Izin Air Minum Isi Ulang
		50. Izin Penyelenggaraan Laboratorium
		51. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinis
		52. Izin Opearsional Puskesmas
		53. Izin Toko Alat Kesehatan
		54. Izin Operasional Ambulans
		55. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		56. Izin Praktik Tenaga Psikolog
3.	Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pemukiman	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Izin Usaha 3. Tanda Daftar Usaha Perorangan (TDUP) 4. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
4.	Sosial	1. Izin Pengumpulan Sumbangan Sosial 2. Izin Operasional Yayasan (Kegiatan Sosial dan Keagamaan) 3. Izin Undian Gratis Berhadiah 4. Izin Pendirian Panti Sosial - Panti Sosial Patirahan Anak - Panti Sosial Taman Penitipan Anak - Panti Sosial Asuhan Anak - Panti Asuhan Bina Remaja - Panti Sosial Tresna Werdha - Panti Sosial Bina Daksa - Panti Sosial Bina Netra - Panti Sosial Bina Runggu Wicara - Panti Sosial Bina Grahita - Panti Sosial Bina Laras - Panti Sosial Bina Pasca Laras

		- Panti Sosial Pamardi Putra - Panti Sosial Karya Wanita - Panti Sosial Bina Karya
5.	Ketenagakerjaan	1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan. 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja 3. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) 4. Izin Penangkal Petir
6.	Pertanahan	1. Izin Lokasi 2. Izin lembaga Pelatihan Kerja 3. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) 4. Izin Penangkal Petir
7.	Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan - AMDAL - UKL-UPL 2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) 3. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit (Land Aplikasi) 4. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) 5. Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Izin Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah Yang di Selenggarakan Oleh Swasta.
8.	Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 2. Izin Usaha Angkutan Barang 3. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) 4. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 5. Izin Penyelenggaraan Taksi 6. Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten 7. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Dalam Negeri.

		8. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
		9. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten
		10. Izin Usaha Terkait dengan Angkutan Perairan
		11. Izin Pembangunan dari Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal
		12. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
		13. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpul lokal
		14. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpulan Lokal
		15. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpulan Lokal
		16. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi
		17. Izin Terminal Khusus/TUKS
		18. Izin Mendirikan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
		19. Izin Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Perkeretapihan Umum
9.	Komunikasi dan Informatika	1. Izin Pemasangan Reklame
		2. Izin Penggelaran Kabel Komunikasi dan Kelistrikan
		3. Izin Pengendalian Menara Telekomunikasi
10.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)
		2. Izin koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)
		3. Izin Usaha Mikro dan Kecil
		4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
		5. Izin pembukaan kantor cabang pembantu koperasi simpan pinjam
		6. Izin pembukaan kantor kas koperasi simpan pinjam
11.	Kelautan dan Perikanan	1. Surat izin usaha perikanan (SIUP) bidang pembudidayaan ikan
		2. Tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil - Air tawar pembenihan maksimal 0,75 Ha

		- Air payau pembenihan maksimal 0,5 Ha; pembesaran maksimal 5 Ha - Air laut pembenihan maksimal 0,5 Ha; pembesaran maksimal 2 Ha.
		3. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDU-PHP), hanya untuk usaha skala mikro dan kecil
		4. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil
12.	Pariwisata	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) - Tanda daftar usaha daya tarik wisata - Tanda daftar usaha kawasan pariwisata - Tanda daftar usaha jasa transportasi wisata - Tanda daftar usaha jasa perjalanan wisata - Tanda daftar usaha jasa makanan dan minuman - Tanda daftar usaha penyediaan akomodasi - Tanda daftar usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi - Tanda daftar usaha penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran - Tanda daftar usaha jasa informasi pariwisata - Tanda daftar usaha jasa konsultan pariwisata - Tanda daftar usaha jasa pramuwisata - Tanda daftar usaha wisata tirta - Tanda daftar usaha spa
13.	Pertanian	1. Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP B) 2. Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP P) 3. Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industry pengoahan hasil perkebunan (IUP) 4. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan 5. Izin Usaha Obat Hewan - Apotik veteriner - Depo - Pet Shop - Poultry Shop - Toko obat hewan 6. Izin Usaha proses prosuksi tanaman pangan 7. Izin usaha penanganan pasca panen tanaman pangan

		8. Izin usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman dan penanganan pasca panen
		9. Izin usaha perbenihan tanaman pangan
		10. Izin usaha budidaya hortikultura (klasifikasi menengah dan besar)
		11. Izin usaha perbenihan hortikultura
		12. Izin usaha peternakan
		13. Izin usaha rumah potong hewan
		14. Izin usaha veteriner
		15. Izin usaha pasar hewan
		16. Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan luas lahan < 25 Ha
		17. Pendaftaran usaha industry pengolahan hasil perkebunan kapasitas : - Kelapa sawit : < 5 ton TBS per jam - Teh < 1 ton pucuk segar per hari (teh hijau) - Teh < 10 ton pucuk segar per hari (teh hitam) - Teh < 1.000 ton per hari
		18. Pendaftaran usaha proses produksi tanaman
		19. Pendaftaran usaha penanganan pasca panen
		20. Pendaftaran usaha keterpaduan antara proses produksi dengan penanganan pasca panen
		21. Pendaftaran usaha produsen benih
		22. Pendaftaran usaha budidaya hortikultura (klasifikasi mikro dan kecil)
		23. Pendaftaran usaha peternakan (klasifikasi kecil)
14.	Perdagangan	1. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
		2. Surat izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A
		3. Surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C
		4. Surat keterangan pengecer minuman beralkohol
		5. Izin usaha toko swalayan (IUTS)
		6. Izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP)
		7. Nomor Induk Berusaha (NIB)
		8. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
		9. Tanda daftar gudang (TDG)
15.	Perindustrian	1. Izin usaha industry (IUI)

		2. Izin perluasan usaha industry (IPUI)
		3. Izin usaha kawasan industry (IUKI)
		4. Izin perluasan kawasan industry (IPKI)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

A. Terbentuknya pasar tunggal MEA 2015 dapat mempengaruhi investasi Indonesia karena akan membuka peluang bagi Negara anggota ASEAN untuk menanamkan modalnya. Penanam modal dapat memanfaatkan Indonesia sebagai tujuan investasi untuk memanfaatkan pasar Indonesia yang besar sekaligus pintu masuk pasar Negara anggota ASEAN. Hal ini berdampak pula pada investasi di Kabupaten Kotawaringin Timur dikarenakan beberapa keunggulan berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :

- Posisi yang strategis
- Potensi ekonomi
- Ketersediaan lahan dan potensi pengembangan kawasan
- Ketersediaan daya dukung produksi
- Potensi tenaga kerja dan pasar yang belimpah
- Kemudahan proses perizinan
- Jaminan keamanan berinvestasi

B. Gejolak Covid-19 yang tak kunjung selesai menyebabkan munculnya beberapa masalah diantaranya :

- Pemutusan hubungan kerja secara massal
- Ketidakpastian perkembangan harga komoditas
- Meningkatnya jumlah perusahaan yang tidak operasional

C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka pelaksanaan PTSP di daerah harus segera dilaksanakan, namun beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- Terbatasnya SDM yang terampil dan ahli
- Terbatasnya sarana dan prasarana
- Deregulasi sektoral belum maksimal sehingga pelaksanaan regulasi di daerah masih belum optimal
- Penerapan sistem Online Single Submission dalam pelayanan izin masih menemui banyak kendala

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKP

Reviu terhadap rancangan awal RKP, meliputi identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk program/kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal perangkat daerah, akan tetapi kebutuhan dana program/kegiatan didanai dengan APBD Kabupaten Kotawaringin Timur dan Dana Dak Non Fisik. Dapat dilihat pada tabel T-C.31 .



Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Kabupaten Kotawaringin Timur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode							Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						
							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (impact dan outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (impact dan outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2							Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
2	18						Urusan Pemerintahan Bidang Penanamanmodal			22.571.764.450		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman modal				20.421.754.450	
2	18	01					Program Penunjang Urusan Pemerintahandaerah Kabupaten/Kota			19.961.147.002		Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota				17.811.137.002	
2	18	01	02	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.112.451.900		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.112.451.900	
2	18	01	02	02	01		Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	MPP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tuniaoan ASN	34 Orang/ bulan	4.112.451.900	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	MPP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ bulan	4.112.451.900	

2	18	01	02	05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				882.408.344	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				882.408.344	
2	18	01	02	05	02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	MPP	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	57 Paket	76.648.000	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	MPP	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	57 Paket	76.648.000	
2	18	01	02	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	MPP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	431.790.896	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	MPP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	431.790.896	
2	18	01	02	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	MPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	85.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	MPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	85.000.000	
2	18	01	02	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	MPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	288.969.448	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	MPP	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	288.969.448	
2	18	01	02	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.266.782.328	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.256.115.704	
2	18	01	02	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	MPP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	46.847.904	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	MPP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	36.181.280	
2	18	01	02	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket		
2	18	01	02	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	MPP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	73.996.424	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	MPP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	73.996.424	
2	18	01	02	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	MPP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	144 Dokumen	19.998.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	MPP	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	144 Dokumen	19.998.000	

						Perundang-undangan		Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Perundang-undangan		Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				
2	18	01	02	06	07	Penyediaan Bahan/Material	MPP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	102.348.000	Penyediaan Bahan/Material	MPP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket	102.348.000		
2	18	01	02	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	MPP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	31.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	MPP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	31.000.000		
2	18	01	02	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MPP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	992.592.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MPP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	992.592.000		
2	18	01	02	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.600.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.061.000.000		
2	18	01	02	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			
2	18	01	02	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			
2	18	01	02	07	05	Pengadaan Mebel	MPP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	2.000.000.000	Pengadaan Mebel	MPP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	2.500.000.000		
2	18	01	02	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MPP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	6.900.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MPP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	4.861.000.000		
2	18	01	02	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MPP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	10 Unit	1.700.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MPP	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	1.700.000.000		

							Lainnya yang Disediakan								
2	18	01	02	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.666.547.630	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.066.204.254	
2	18	01	02	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	13.396.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	13.396.000
2	18	01	02	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	1.530.308.352	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	MPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	929.964.976
2	18	01	02	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-
2	18	01	02	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.122.843.278	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	MPP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.122.843.278
2	18	01	02	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			432.956.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				432.956.800	
2	18	01	02	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MPP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	73.120.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	MPP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	73.120.800

2	18	01	02	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MPP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	99.286.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	MPP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	99.286.000	
2	18	01	02	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MPP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	80.840.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	MPP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	80.840.000	
2	18	01	02	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MPP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	179.710.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MPP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	179.710.000	
2	18	01	02	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MPP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	MPP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		
2	18	02				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				300.000.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				300.000.000	
2	18	02	02	01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				-	
2	18	02	02	01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen		

2	18	02	02	01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 Kegiatan Usaha		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2 Kegiatan Usaha		
2	18	02	02	02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				300.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				300.000.000	
2	18	02	02	02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	MPP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	MPP	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	
2	18	02	02	02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	MPP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	MPP	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	
2	18	03				Program Promosi Penanaman Modal				700.150.000	Program Promosi Penanaman Modal				700.150.000	
2	18	03	02	01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				700.150.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				700.150.000	
2	18	03	02	01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	MPP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	MPP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	
2	18	03	02	01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	MPP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	550.150.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	MPP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	550.150.000	

2	18	04				Program Pelayanan Penanaman Modal				840.122.000	Program Pelayanan Penanaman Modal				840.122.000	
2	18	04	02	01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			200 Izin	840.122.000	Pelayana n Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadl Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			200 Izin	840.122.000	
2	18	04	02	01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	MPP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	45.000.000	Peny ediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	MPP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	45.000.000	
2	18	04	02	01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	MPP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	200 Kegiatan Usaha	275.776.000	Pem antauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	MPP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	200 Kegiatan Usaha	275.776.000	
2	18	04	02	01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	MPP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20 Orang	50.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	MPP	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	20 Orang	50.000.000	

2	18	04	02	01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	MPP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2 Kegiatan Usaha	469.346.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	MPP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	2 Kegiatan Usaha	469.346.000	
2	18	05				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				770.345.448	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				770.345.448	
2	18	05	02	01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				770.345.448	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				770.345.448	
2	18	05	02	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	MPP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Kegiatan Usaha	375.776.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	MPP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Kegiatan Usaha	375.776.000	
2	18	05	02	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	MPP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Pelaku Usaha	288.969.448	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	MPP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	50 Pelaku Usaha	288.969.448	
2	18	05	02	01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	MPP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	25 Kegiatan Usaha	105.600.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	MPP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	25 Kegiatan Usaha	105.600.000	

2	18	06				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				-	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal				-	
2	18	06	02	01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	
2	18	06	02	01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	MPP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	-	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	MPP	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	-	

2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tidak ada usulan program dan kegiatan yang sifatnya langsung berdampak kepada masyarakat dalam hasil Musrenbang Kecamatan sebagaimana pada Tabel Tabel T-C.32.

TABEL T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	TIDAK ADA USULAN



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional/ Provinsi

No	Kebijakan Nasional/Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal	Kewenangan pemrosesan izin sebagian masih berada pada instansi-instansi teknis.
2.	Kewenangan Penerbitan Izin Investasi diatas >10 Milyar	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) 3. Peraturan Menteri Perindustrian	Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

		Republik Indonesia Nomor 41/M-INO/PER/6/2008	
3.	Pelaksanaan OSS (Online Single Submission)	1. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	Penerapan OSS belum resmi diterapkan di daerah namun SPIPISE sebagai system pelayanan perizinan investasi sebagai system yang diterapkan sebelumnya telah dihentikan.
4.	Regulasi dan kebijakan yang out of date	1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Perka BKPM Nomor 10 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Standar pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Kabupaten/Kota.	Regulasi yang menjadi acuan dalam dikumen-dokumen sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan di daerah perlu untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini.

a. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk merealisasikan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu ditetapkan tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program secara umum serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan misi ke-3 : “ Muwujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun kedepan sebagai berikut : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan ini selanjutnya akan dijabarkan dalam sasaran : Meningkatnya investasi di daerah.

Untuk mewujudkan misi ke-4 : “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance)”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan untuk lima tahun

ke depan sebagai berikut : Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Tujuan ini akan dijabarkan dalam sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan 2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 telah mempertimbangkan beberapa faktor antara lain :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, yaitu :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju dan Sejahtera.

Misi ke-3 : Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja.

Misi ke-4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawah (good governance).

2. Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu :

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- Kewenangan penerbitan izin investasi.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2024 terdapat 6 program dan 12 kegiatan dan 40 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp 22.571.764.450,-.

Berikut ini tabel rekapitulasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 .

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kotawaringin Timur

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (impact dan outcome), dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target	Rp.	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2						Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
2	18					Urusan Pemerintahan Bidang Penanamanmodal				22.571.764.450				27.571.764.450
2	18	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahandaerah Kabupaten/Kota				19.961.147.002				24.961.147.002
2	18	01	02	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.112.451.900				4.112.451.900
2	18	01	02	02	01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	MPP	34 Orang /bulan	4.112.451.900	APBD		34 Orang/bulan	4.112.451.900
2	18	01	02	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				882.408.344	APBD			882.408.344
2	18	01	02	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keleng kapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	MPP	57 Paket	76.648.000	APBD		57 Paket	76.648.000
2	18	01	02	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	MPP	25 Orang	431.790.896	APBD		25 Orang	431.790.896

2	18	01	02	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	MPP	30 Orang	85.000.000	APBD		30 Orang	85.000.000
2	18	01	02	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	MPP	30 Orang	288.969.448	APBD		30 Orang	288.969.448
2	18	01	02	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.266.782.328				1.266.782.328
2	18	01	02	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	MPP	10 Paket	46.847.904	APBD		10 Paket	46.847.904
2	18	01	02	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		10 Paket		APBD		10 Paket	
2	18	01	02	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	MPP	10 Paket	73.996.424	APBD		10 Paket	73.996.424
2	18	01	02	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	MPP	144 Dokumen	19.998.000	APBD		144 Dokumen	19.998.000
2	18	01	02	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	MPP	20 Paket	102.348.000	APBD		20 Paket	102.348.000
2	18	01	02	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	MPP	50 Laporan	31.000.000	APBD		50 Laporan	31.000.000
2	18	01	02	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	MPP	200 Laporan	992.592.000	APBD		200 Laporan	992.592.000

2	18	01	02	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.600.000.000				15.600.000.000
2	18	01	02	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit		APBD		1 Unit	
2	18	01	02	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit		APBD		1 Unit	
2	18	01	02	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	MPP	10 Unit	2.000.000.000	APBD		10 Unit	2.000.000.000
2	18	01	02	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	MPP	10 Unit	6.900.000.000	APBD		10 Unit	11.900.000.000
2	18	01	02	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	MPP	10 Unit	1.700.000.000	APBD		10 Unit	1.700.000.000
2	18	01	02	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.666.547.630				2.666.547.630
2	18	01	02	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	MPP	5 Laporan	13.396.000	APBD		5 Laporan	13.396.000
2	18	01	02	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	MPP	10 Laporan	1.530.308.352	APBD		10 Laporan	1.530.308.352

BAB IV

RENCANA KINERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur merencanakan 6 program dan 12 kegiatan dan 40 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp 22.571.764.450,-. Program dimaksud terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 kegiatan yaitu :
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 4.112.451.900,-
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 882.408.344,-
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 7 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 1.266.782.328,-
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 10.600.000.000,-
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 2.666.547.630,-
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 5 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 432.956.800,-
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan 2 kegiatan yaitu :
 - 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp -
 - 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 300.000.000,-
3. Program Promosi Penanaman Modal dengan 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 700.150.000,-
4. Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 840.122.000,-

5. Program Pengendalian Pelaksanaan terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 770
2) .345.448,-
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - 1) Pengelolaan Data dan Informasi perizinan dan non perizinan yang dengan 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp -,-



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pengalaman pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meskipun perencanaan anggaran telah dibuat sebaik dan sematang mungkin tetapi masih ada kegiatan yang tidak ada anggarannya sesuai dengan perencanaan, terutama kegiatan per bidang.
2. Penggunaan anggaran berdasarkan pada DPA SKPD harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan tertib sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan semua dengan baik sesuai aturan yang berlaku.
3. Dari beberapa program dan kegiatan yang direncanakan ada beberapa kegiatan yang belum ada ketersediaan anggaran atau ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan karena kegiatan yang belum ada ketersediaan anggaran terutama dalam rangka mengakomodir masalah operasional dan lainnya mengenai Mal Pelayanan Publik.

Sampit, Juni 2023

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kotawaringin Timur



DIANA SETIAWAN, S.E.,M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 197506041996031002

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				200 Pelaku Usaha	50.479.500,00	- Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pemulihan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikasi masyarakat adat untuk Kalteng Blok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-		45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	-	-	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-			12 bulan	10.907.037.012,00						-	8.910.529.554,00	
	-	-	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang	-			4 Dokumen	619.438.000,00			-	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikasi masyarakat adat untuk Kalteng Blok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-	-	432.958.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	-														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	118.000.000,00	- Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikasi masyarakat adat untuk Kalteng Blok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-		60.840.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	-	-	Persentase data dan sistem informasi penanaman modal yang dikelola	-			1 aplikasi	50.267.938,00						-	0,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Tarkolaborasi Pengaduan Masyarakat Terdapat Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				20 Orang	27.920.000,00	- Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengemba ngkan konktivitas destinasi p erwisata, p engembang an ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat			60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	-	-	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-			12 bulan	10.807.037.012,00						-	8.810.529.534,00	
	-	-	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang	-			4 Dokumen	619.438.000,00			-	Mengemba ngkan konktivitas destinasi p erwisata, p engembang an ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat		-	432.958.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	-														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	171.990.000,00	- Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengemba ngkan konktivitas destinasi p erwisata, p engembang an ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat			99.286.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	Terwujudnya Kelancaran Penyediaan Layanan Administrasi Perangkat Daerah	-	-	-	200 Laporan	980.957.050,00	-	-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan pemberian bantuan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kabupaten Beraut 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-	-	1.265.782.328,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisain	-	-	-	10 Paket	108.870.550,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan pemberian bantuan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kabupaten Beraut 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-	-	46.847.904,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bagan dan Perencanaan Perundang-Undangan yang Didisain	-	-	-	144 Dokumen	19.998.000,00	Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikasi masyarakat adat untuk Kabupaten Beraut 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-	-	19.998.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSITRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELUPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Timor				50 Laporan	100.000.000,00	- Kab. Korwailigin Timor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengemban gkan konktivitas desentralisasi p erwisata, p engembang an ekonomi hijau dan sdfikat masyarakat adasi untuk Kalleng Elok Pengujian Ekonomi Masyarakat			31.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Jumlah jasa yang harus dibayar				15 Laporan	3.612.393.596,00			Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling				2.658.647.630,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							5 Laporan	10.396.000,00	- Kab. Korwailigin Timor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkat kan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	Mengemban gkan konktivitas desentralisasi p erwisata, p engembang an ekonomi hijau dan sdfikat masyarakat adasi untuk Kalleng Elok Pengujian Ekonomi Masyarakat			13.396.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	-			200 Laporan	980.957.050,00			-	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikasi masyarakat adat untuk Keheng Blok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-	-	1.268.782.328,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	498.298.000,00	- Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikasi masyarakat adat untuk Keheng Blok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-	-	992.592.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Paket	177.222.500,00	- Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata, pengembangan ekonomi hijau dan sertifikasi masyarakat adat untuk Keheng Blok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-	-	102.348.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2022	PRANALAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELompok Sasaran	PRAKSIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	Jumlah dokumen penelitian/batang milik daerah penunjang	-	-	-	4 Dokumen	619.439.000.00	-	-	-	Mengembangkan kegiatan konstruksi desain p berwisata, p pengembangan an ekonomi pemukim berhasil masyarakat ada untuk Kalleng Elok 2. Pengujian Ekonomi Masyarakat	-	-	432.958.800.00	DINAS PEYANAYAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-	-	-	Jumlah Soteng dan Prasarene Gekung Keker atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dinikmati	-	-	-	2 Unit	189.859.000.00	Kab. Kotawaringin Timur, Sentra Kecamatan, Sentra Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengembangkan kegiatan konstruksi desain p berwisata, p pengembangan an ekonomi pemukim berhasil masyarakat ada untuk Kalleng Elok 2. Pengujian Ekonomi Masyarakat	-	-	179.770.000.00	DINAS PEYANAYAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-	-	-	Jumlah Kandangan Persempitan Dunes atau Kandangan Dunes dengan yang Diberikan dan dijelaskan Pajaboy	-	-	-	3 Unit	140.590.000.00	Kab. Kotawaringin Timur, Sentra Kecamatan, Sentra Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengembangkan kegiatan konstruksi desain p berwisata, p pengembangan an ekonomi pemukim berhasil masyarakat ada untuk Kalleng Elok 2. Pengujian Ekonomi Masyarakat	-	-	73.120.800.00	DINAS PEYANAYAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemerintah Kontinuen Portofolio Berusaha dan Non Portofolio Penanaman Modal				200 Kegiatan Usaha	50.638.500,00	- Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengemban gkan konktivitas destinasi p erwisata, p engembang an ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adati untuk Kalteng Ekok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-		275.776.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
7.	-	-	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	-			3 kegiatan	380.404.000,00						-	700.150.000,00	
	-	-	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri antara lain Seminar Investasi, workshop strategi promosi dan fasilitasi persyusunan bahan promosi investasi daerah	-			3 kegiatan	380.404.000,00			Memperku s Ketahanan Ekonomi Untuk Portu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkadilan	Mengemban gkan konktivitas destinasi p erwisata, p engembang an ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adati untuk Kalteng Ekok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-	-	700.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	-														
			Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80.404.000,00	- Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kal/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperku s Ketahanan Ekonomi Untuk Portu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkadilan	Mengemban gkan konktivitas destinasi p erwisata, p engembang an ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adati untuk Kalteng Ekok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
8.	-	-	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-			12 bulan	10.907.037,012,00						-	8.810.529.534,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	Tertaksennya Kolaborasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 bulan	5.149.928.378,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan pemban- gutan infrastruktur Mendukung Peningkatan Pembiayaan dan Ekonomi Masyarakat Kalteng Ber- martabat 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-	-	4.112.451.500,00	DINAS PEKANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-	-	-	Jumlah Orang yang Mencrima Gaji dan Tunjangan ASN	-			34 Orang/bulan	5.149.928.378,00	Kab. Kolowaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan pemban- gutan infrastruktur Mendukung Peningkatan Pembiayaan dan Ekonomi Masyarakat Kalteng Ber- martabat 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-	-	4.112.451.500,00	DINAS PEKANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-	-	-	Jumlah jasa yang harus dibayar	-			15 Laporan	3.812.393.586,00			-	Mengembangkan konktivitas desainasi p erwisata, p engembangan an ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-	-	2.666.547.530,00	DINAS PEKANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
-	-	-		-									-	-		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	2.460.656.550,00	- Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengemba ngkan konektivitas destinasi p arwisata, p engembang an ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-		1.530.308.352,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
9.	-	-	Persentase Peningkatan Promosi Penanaman Modal	-			3 kegiatan	390.404.000,00					-	-	700.150.000,00	
	-	-	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah di dalam negeri antara lain Seminar Investasi, workshop strategi promosi dan fasilitasi penyusunan bahan promosi investasi daerah	-			3 kegiatan	390.404.000,00			-	Mengemba ngkan konektivitas destinasi p arwisata, p engembang an ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-	-	700.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	300.000.000,00	- Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengemba ngkan konektivitas destinasi p arwisata, p engembang an ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-		550.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
10.	-	-	Persentase Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-			12 bulan	10.907.037.012,00					-	-	8.810.528.554,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	1.341.347.036,00	- Kab. Kotawaringin Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mengemba ngkan konektivitas destinasi p ariwisata, p engembang an ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok 2. Penguatan Ekonomi Masyarakat	-		1.122.843.278,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA						5.811.773.950,00							1.626.796.158,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.811.773.950,00							1.626.796.158,00	
	-	-						5.811.773.950,00							1.626.796.158,00	
1.	-	-	Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan sesuai ketentuan perundangan	-			0 persen	0,00						-	200.000.000,00	
	-	-	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga yang terlaksana sesuai ketentuan perundangan	-			0 persen	0,00			-	3. Sumberd aya Manusia	-	-	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				0 Organisasi	0,00	- Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Sumberd aya Manusia	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	-	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	- Kab. Kotawaringin Timur, Mentawa Baru Ketapang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	3. Sumberd aya Manusia	-		0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2.	-	-	Persentase pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100*Persen			100 persen	5.811.773.950,00						100*Persen	566.796.158,00	